



## Relokasi Pedagang Sarkem Belum Teranggarkan

**YOGYA, TRIBUN** - Kalangan legislatif menilai solusi untuk pedagang pasar kembang (sarkem) terancam menemui jalan gelap. Hal ini lantaran hingga kini pihak eksekutif tidak segera mengusulkan anggaran untuk relokasi pedagang yang

**Relokasi Pedagang Sarkem Belum**  
 • Sambungan Hal 13

Anggaran ini diperuntukkan untuk solusi nyata bagi pedagang yang terdampak pengurusan tersebut.

"Kalau sampai saat ini belum ada penganggaran dan usulan, maka solusi untuk pedagang masih samar-samar," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Ketua Komisi B, Nasrul Khoiri sebelumnya juga mengatakan, Pemkot harus berani mengambil langkah, pasalnya selama ini terkesan tidak berani memberikan solusi dan lepas tangan. Untuk itu, setidaknya pembahasan anggaran untuk pedagang ini juga sudah diberikan untuk APBD 2018 mendatang.

"Kalau memang akhir Agustus ini tidak ada tindak lanjut, maka akan kami evaluasi. Jangan sampai Pemkot dipandang lepas tangan

digusur dari sisi selatan Stasiun Tugu ini pada anggaran perubahan 2017.

"Hingga saat ini belum dimasukkan (anggaran) ke perubahan. Kemungkinan, untuk APBD murni pun tidak bisa dimasukkan," ujar Anggota Komisi B, Danang Rudiymoko, Rabu (23/8).

Sebelumnya, Komisi B memberikan tenggat waktu hingga akhir Agustus untuk eksekutif agar mengajukan anggaran.

• ke halaman 14

karena tidak ada langkah kongkrit," jelasnya.

Politisi PKS ini menambahkan, Pemkot pun harus selalu update kegiatan untuk membicarakan solusi dengan PT KAI terkait nasib pedagang. Hal utama yang harus dipegang terkait dengan polemik ini adalah pedagang yang terdampak pengurusan memiliki kartu bukti pedagang (KBP).

"Ini artinya pedagang memiliki hak untuk dijamin Pemkot setempat. Jaminan bisa berupa pemindahan pedagang ke pasar tradisional lainnya, sehingga mereka masih bisa berjualan dan juga hidup," kata Nasrul.

Nasrul pun menambahkan, tidak tertutup kemungkinan jika memang tidak ada langkah dari Pemkot terkait nasib pedagang, maka tak ada jalan lain selain pembentukan panitia khusus hingga menggulirkan hak angkat.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi me-

ngatakan, pihaknya tetap memikirkan nasib pedagang Pasar Kembang. Meski demikian, pihak Pemkot masih memetakan lagi administrasi pedagang sesuai dengan kartu bukti pedagang (KBP).

"Masalah Sarkem ini sebenarnya prosesnya sudah lama dan pedagang sudah tahu. Masih dimungkinkan adanya pengalihan pedagang ke pasar tradisional lain. Namun, tentunya disesuaikan dengan KBP-nya," papar Heroe, Rabu (23/8/2017).

Sementara Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, akan memikirkan solusi bagi pedagang. Salah satunya dengan membantu pedagang untuk berkomunikasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) agar pedagang bisa diakomodir. "Pedagang resmi tentunya dipikirkan oleh PT KAI, namun masih nunggu," paparnya. Dalam kesempatan itu, Haryadi meminta seluruh pihak menjaga kondusifitas. (ais)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------|--------------|-------|---------------|
|----------|--------------|-------|---------------|

| Instansi                               | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|--|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 01 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005